

## Ketahanan Ideologi Pancasila Dalam Bidang Politik, Pendidikan dan Kemasyarakatan

Ade Sopyan Hadi<sup>a,1\*</sup>, Ode Jamal<sup>b,2</sup>

<sup>a,b</sup>Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,  
Universitas Cenderawasih

[adesopyanhadi@fkip.uncen.ac.id](mailto:adesopyanhadi@fkip.uncen.ac.id), [odejamal00@gmail.com](mailto:odejamal00@gmail.com)

\*korespondensi penulis

Naskah diterima: 27 Agustus 2025, direvisi: 15 September 2025, disetujui: 25 September 2025

---

### Abstrak

Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang berisi nilai-nilai kebaikan yang harusnya di jadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun pada Indonesia terdapat berbagi permasalahan yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila seperti bidang politik misalnya korupsi *base transceiver station* (BTS) pada kemenkominfo, Dalam bidang pendidikan kerap kali kebebasan beragama dinodai seperti seorang siswi non-muslim di SMKN 2 Padang, Sumatera Barat, diminta mengenakan hijab oleh pihak sekolah, pada aspek masyarakat yaitu adanya kasus pengeroyokan bos rental mobil di Kabupaten Pati Jawa Tengah. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Ketahanan Ideologi Pancasila dalam Bidang Politik, Pendidikan, dan Kemasyarakatan. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, sedangkan jenis penelitian yang digunakan yaitu studi kepustakaan, adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, artikel jurnal serta berbagai liputan yang berkaitan dengan masalah yang akan dipecahkan. Hasil penelitian ini yaitu menunjukkan data bahwa peran pemerintah Indonesia seperti badan pembinaan ideologi Pancasila begitu penting dalam pendidikan dan pelatihan Pancasila, peran kementerian hak asasi manusia dalam menjamin keberlangsungan hak bangsa Indonesia, serta kementerian Pendidikan penting dalam pemelihara persatuan pada generasi muda. Selain itu, terdapat peran masyarakat juga menjadi aspek yang penting untuk mempertahankan ideologi Pancasila seperti melalui organisasi masyarakat yang bernama pemuda Pancasila dalam mengorganisasi masyarakat yang berasal dari berbagai latar belakang usia maupun pekerjaan agar tetap ingat dan membela Pancasila. Kesimpulan penelitian ini yaitu dapat diketahui bahwa peran berbagai pihak baik pemerintah maupun masyarakat begitu penting dalam penguatan ketahanan ideologi Pancasila.

**Kata-kata kunci:** Ketahanan; Ideologi; Pancasila

---

### Abstract

***The Resilience of Pancasila Ideology in the Fields of Politics, Education and Society.*** Pancasila is the ideology of the Indonesian nation that contains the values of goodness that should be used as a guideline in the life of the nation and state. However, in Indonesia there are many problems that do not reflect the values of Pancasila such as the political field for example corruption base transceiver station (BTS) at the Ministry of Communication and Information, In the field of education often religious freedom is tarnished such as a non-Muslim student at SMKN 2 Padang, West Sumatra, asked to wear a hijab by the school, in the aspect of society there is a case of assault on the boss of a car rental in Pati Regency, Central Java. The purpose of this study is to find out how the resilience of the Pancasila ideology in the fields of politics, education, and society. The research method used in this study is a qualitative approach, while the type of research used is a literature study, the data collection technique carried out in this study is by conducting research on books, literature, journal articles and various coverage related to the problem that will be explained. The results of this study show that the role of the Indonesian government, such as the Pancasila ideology development agency, is very important in Pancasila education and training, the

---

*role of the Ministry of Human Rights in ensuring the sustainability of the rights of the Indonesian people, and the Ministry of Education is important in maintaining unity in the younger generation. In addition, there is a role of society which is also an important aspect in maintaining the Pancasila ideology, such as through a community organization called the Pancasila youth in organizing people from various age backgrounds and occupations to keep remembering and defending Pancasila. The conclusion of this study is that it can be seen that the role of various parties, both government and society, is very important in strengthening the resilience of the Pancasila ideology.*

**Keywords:** Resilience; Ideology; Pancasila

## Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki ideologi bernama Pancasila. Pancasila adalah ideologi bangsa yang menjadi aset serta pondasi atau dasar berdirinya negara sebagai hasil penggalian nilai oleh para pahlawan. Maksudnya yaitu tiap-tiap nilai yang ada pada Pancasila digali berdasarkan apa yang ada dalam keseharian rakyat Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila tersebut merupakan ideologi negara dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia (Antari, 2018). Berdasarkan hal tersebut maka sudah menjadi kewajiban bersama dalam mempertahankan ideologi Pancasila.

Pada negara Indonesia terdapat tantangan yang dihadapi ideologi Pancasila maupun bangsa Indonesia. Tantangan tersebut begitu beragam dari berbagai ranah. Tantangan tersebut seperti yang terdapat pada bidang politik, pendidikan, maupun kemasyarakatan. Oleh karena itu tantangan tersebut perlu dihadapi dan dilawan oleh semua pihak agar Pancasila dapat berjalan sebagaimana mestinya. Tantangan dapat dikatakan sebagai sesuatu yang dapat mengganggu kestabilan suatu hal yang apabila dihadapi dengan baik maka akan tercipta sesuatu yang lebih kuat (Sugiono, 2021).

Pada aspek politik terjadi berbagai problematika yang menerpa pemerintah

Indonesia. Salah satunya seperti adanya masalah korupsi, Pengadilan tipikor telah menetapkan keenam terdakwa dalam kasus korupsi *base transceiver station* (BTS) pada kemenkominfo diketahui sudah melakukan korupsi terhadap dana pengadaannya yang berjumlah sekitar Rp 8,03 T. Para tersangka tersebut seperti mantan menkominfo Johnny G Plate, Mantan Dirut Bakti Kemenkominfo, mantan tenaga ahli *human development* UI, Mantan Komisaris PT Solutech Media Sinergy, Mantan Dirut Mora Telematika Indonesia, serta mantan direktur PT Huawei Tech Investment. Mereka terbukti bersalah dan bersekongkol dalam menyelewengkan dana negara sehingga realisasi akan pengadaan menara internet tersebut terhambat (Kamil, 2023).

Problematisa korupsi yang ada pada pemerintah siring dengan berbagai adanya pengaruh globalisasi yang membuat kebutuhan serta gaya hidup tinggi terkadang membuat pemerintah mengambil keputusan di luar garis ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pancasila. Tindakan-tindakan yang dipengaruhi oleh globalisasi tersebut ditunjukkan untuk mempengaruhi alam pikir dan kejiwaan manusia terutama para pejabat yang mengambil keputusan (*the center of gravity*) serta para pemuka pendapat (*critical mass*), yang biasanya dipengaruhi oleh aktor-aktor yang kuat (*major powers*) (Latif, 2020).

Dalam bidang pendidikan, kerap kali kebebasan beragama dinodai di lingkungan pendidikan yang harusnya menjadi wadah belajar keberagaman, akan tetapi hal tersebut ternodai dan menjadi wadah pemaksaan terhadap suatu agama maupun identitas tertentu. Oleh karena itu hal tersebut tentu bertentangan dengan sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang maha Esa dimana salah satu nilai yang terkandung di dalamnya adalah setiap bangsa Indonesia bebas memeluk agama yang diyakininya dan tidak boleh ada pemaksaan dari pihak manapun dalam memeluk agama. Hal tersebut seperti yang pernah terjadi pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMKN) 2 Padang.

Seorang siswi non-muslim di SMKN 2 Padang, Sumatera Barat, diminta mengenakan hijab oleh pihak sekolah. Peristiwa ini mendapat perhatian dari Mendikbud Nadiem Makarim, yang menilai tindakan tersebut sebagai bentuk intoleransi terhadap keberagaman. Setelah menerima laporan, Kemendikbud segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah (Pemda) setempat dan mengambil langkah tegas. Kemendikbud juga mengapresiasi respons cepat Pemda dalam menindak pihak-pihak yang terbukti melanggar. Selain itu, Nadiem meminta seluruh Pemda memberikan sanksi tegas kepada semua yang terlibat dalam pelanggaran disiplin, termasuk kemungkinan pencopotan jabatan (Ihsan, 2021).

Pada aspek masyarakat kasus kekerasan yang mencoreng nilai-nilai Pancasila masih terus terjadi. Pancasila yang berisi ajaran mengutamakan musyawarah untuk mufakat malah diabaikan sehingga sering terjadinya tindak kekerasan tanpa adanya negosiasi. Pada sila keempat Pancasila yaitu Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam

Permusyawaratan Perwakilan memiliki makna bahwa kita dalam mengambil suatu keputusan harus dilatari dengan musyawarah mufakat. Musyawarah tersebut guna memecahkan masalah maupun berfungsi sebagai wadah penyelesaian masalah. Namun Hal tersebut tercoreng dengan adanya kasus pengeroyokan bos rental mobil di Pati, Jawa Tengah.

Pihak polisi dari Resor Pati telah menetapkan satu orang yang masih berstatus tersangka baru pada kasus kejahatan yang menyebabkan seseorang bernama Burhanis meninggal dunia. Burhanis adalah seorang pengusaha penyedia jasa sewa mobil yang berasal dari Jakarta. Burhanis meninggal dunia setelah dituduh sebagai pencuri dan dikeroyok massa saat mengambil mobil sewaanannya di Desa Summersoko, Kecamatan Sukolilo, Pati, Jawa Tengah, pada Kamis, 6 Juni 2024. Mobil tersebut berhasil ia temukan melalui pelacakan *Global Positioning System* (GPS). Pada saat korban melakukan percobaan membuka pintu mobil dengan menggunakan kunci Cadangan yang dimilikinya, warga sekitar yang melihat hal tersebut berteriak dengan mengatakan maling kepada korban. Hal tersebut memancing reaksi warga yang langsung melakukan penganiayaan terhadap korban sampai meninggal (Gabriela, 2024).

Pada bidang ekonomi terdapat beberapa kasus pelaku usaha yang bertentangan dengan sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kasus tersebut yaitu seperti kasus skincare palsu yang dapat membahayakan kesehatan dan bertentangan dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Salah satu kasus terjadi di Jakarta, Modus Penipuan Kosmetik, Beli Krim, Serum dan Toner di Pasar Asemka Lalu Dikemas Ulang. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan dua pelaku pengedar kosmetik

palsu sebagai tersangka kasus tindak pidana kesehatan dan atau perlindungan konsumen, Senin, 24 Februari 2025 di Jakarta.

Dua tersangka produsen kosmetik palsu, Muhammad Sidik alias MS (35 Tahun) dan Rohyani alias R (37 tahun), disebut tidak memiliki kompetensi memproduksi kosmetik. Pelapor mengadukan dugaan pelanggaran perlindungan konsumen setelah membeli kosmetik yang tidak dilengkapi petunjuk bahasa, kandungan, dan label Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Pelapor pun merasakan dampak gara-gara produk kosmetik palsu tersebut. "Ada agak kemerah-merahan dan gatal," kata Indra (Sari, 2025). Adanya kasus ini merupakan suatu gambaran kasus yang telah mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan yang hendaknya menghormati hak hidup orang lain.

Kasus yang lain yaitu adanya pabrik tempat produksi narkoba. Polres Bogor mengungkap keberadaan pabrik narkoba tersembunyi (*clandestine laboratory*) yang memproduksi tembakau sintetis di kawasan perumahan Sentul City, Kabupaten Bogor. Dalam penggerebekan tersebut, polisi menyita satu ton tembakau sintetis siap edar dan menangkap dua orang peracik berinisial HP dan AA, masing-masing berusia 34 tahun. Sementara itu, dua orang yang diduga menjadi pengendali pabrik masih buron dan telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Selain barang bukti tembakau sintetis, polisi juga menemukan 125 botol *spray* MDMB Inaca. Para tersangka dijerat pasal 114 ayat 2, pasal 112, dan pasal 113 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman mati atau penjara hingga 20 tahun (Murtadho, 2025).

Pancasila selain menjadi pedoman dalam hidup berbangsa juga menjadi filsafat dalam kenegaraan. Bagaimanapun buruknya pemerintahan tetapi Pancasila akan tetap perkasa dalam memayungi hidup masyarakat Indonesia. Meskipun seringkali ditemukan kasus yang berusaha untuk menggeser Pancasila dengan ideologi lain akan tetapi telah terbukti bahwa Pancasila begitu baik dan menjadi pilihan terbaik bangsa Indonesia. Maka, berdasarkan hal tersebut Pancasila dapat dikatakan sebagai norma yang sifatnya dasar dan sangat penting dalam kehidupan berbangsa maupun bernegara (Dewi & Sunarso, 2020).

Alasan peneliti memilih judul Ketahanan Ideologi Pancasila Dalam Bidang Politik, Pendidikan dan Kemasyarakatan dikarenakan penelitian ini memiliki keunikan dibanding penelitian yang pertama yaitu penelitian Jagad (2024) yang berjudul Upaya Deradikalisme Dalam Lingkungan Sekolah Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Ideologi, adapun hasil penelitian ini menunjukkan data bahwa untuk menunjang radikalisme diperlukan salah satu pendekatan yang dapat dibangun melalui generasi muda sejak mereka dibangku pendidikan. Nilai-nilai dari deradikalisme dapat dikenalkan dan disisipkan pada ruang mereka bergerak di lingkungan sekolah. Membangun deradikalisasi agama melalui lembaga pendidikan adalah strategi terbesar ke depan untuk promosi deradikalisasi.

Kedua, penelitian Rukmana et al., (2020) yang berjudul Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Contoh Nyata Ketahanan Ideologi (Studi di Kampung Pancasila, Dusun Nogosari, Desa Tirenggo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta). Hasil penelitian tersebut menunjukkan data bahwa Berbagai aktivitas rutin dilaksanakan sebagai

bagian dari upaya menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila di Kampung Pancasila, Desa Tirenggo. Kegiatan tersebut meliputi kerja bakti, musyawarah tingkat dusun, diskusi bersama warga, penggalangan dana untuk bantuan kemanusiaan, arisan rutin, hingga musyawarah yang berkaitan dengan isu-isu kebangsaan. Nilai-nilai Pancasila yang dikembangkan di wilayah ini mencakup aspek religius atau ketuhanan, sikap toleran, semangat persatuan, pengambilan keputusan melalui musyawarah, serta penerapan keadilan sosial. Proses pengembangan nilai-nilai tersebut dilakukan dengan menginternalisasikannya ke dalam berbagai kegiatan masyarakat yang dirancang khusus untuk mendukung penguatan nilai-nilai Pancasila.

Ketiga, penelitian Shofa (2022) yang berjudul *Praktik Kehidupan Toleransi di Masyarakat Desa Pancasila dan Implikasinya terhadap Ketahanan Ideologi* (Studi di Desa Wonorejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Bondowoso). Hasil penelitian ini menunjukkan data bahwa Desa Pancasila yang berada di Desa Wonorejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur merupakan wujud nyata penerapan toleransi di tengah masyarakat yang beragam agama. Kehidupan warga yang harmonis dan aman mencerminkan terbentuknya desa tersebut. Hal ini terlihat dari kebiasaan saling menghormati, kerja sama dalam gotong royong, hidup rukun, hingga simbol-simbol toleransi seperti mengenakan atribut keagamaan lain, membersihkan tempat ibadah, mengikuti upacara keagamaan tertentu, dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial secara kolektif.

Keempat, penelitian Taufiq (2024) berjudul *Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulangi Ancaman Intoleransi Beragama Terhadap Ketahanan Ideologi Pancasila Di Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat*. Hasil penelitian ini menunjukkan data bahwa Untuk menangkal ancaman intoleransi terhadap Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, diperlukan kebijakan yang dirancang melalui berbagai pendekatan dan strategi. Intoleransi sendiri dapat muncul dalam berbagai wujud, seperti perlakuan diskriminatif terhadap kelompok minoritas agama atau etnis, penyebaran ideologi radikal yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, hingga munculnya politik identitas yang menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Sebagai ideologi dan dasar negara, Pancasila memuat lima sila yang menjadi fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, tantangan terhadap nilai-nilai pluralisme, persatuan, dan kesatuan adalah hal yang kerap dihadapi dalam implementasinya.

Kelima, penelitian Rusnaini et al., (2021) yang berjudul *Intensifikasi Profil Pelajar Pancasila dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Pribadi Siswa*. Hasil penelitian ini menunjukkan data bahwa Profil Pelajar Pancasila memiliki peran penting dalam membentuk ketahanan pribadi peserta didik. Tujuan utama dari profil ini adalah untuk menjaga keluhuran nilai moral bangsa, mempersiapkan individu menjadi warga dunia yang bertanggung jawab, mewujudkan keadilan sosial, serta mengembangkan kompetensi yang relevan dengan tuntutan Abad ke-21. Setiap individu, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam lingkungan profesional, perlu

menginternalisasi dan mencerminkan karakter Pelajar Pancasila. Pelajar dalam konteks ini merujuk pada sumber daya manusia yang unggul — yakni pembelajar sepanjang hayat yang memiliki wawasan global serta bertindak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai tersebut tidak hanya penting untuk dipahami secara konseptual, tetapi yang lebih utama adalah penerapannya dalam kehidupan sehari-hari baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, maupun tempat kerja. Pembentukan ketahanan pribadi menjadi langkah awal yang fundamental, karena dari sanalah akan tumbuh ketahanan keluarga, ketahanan sosial, ketahanan wilayah, hingga ketahanan nasional.

Keunikan peneliti dibandingkan penelitian yang telah disebutkan diatas yaitu penelitian diatas studinya masih terbatas hanya pada lingkungan sekolah dan hanya pada suatu kampung dan satu lagi tingkat kabupaten. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan peneliti yaitu cakupannya lebih luas seperti pada bidang politik, pendidikan dan tingkat kemasyarakatan secara nasional. Oleh karena itu, penelitian peneliti diharapkan dapat mengisi kekosongan hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya. Sehingga hal ini juga diharapkan dapat menjadi kebaruan ataupun mendukung penelitian yang sudah ada sebelumnya.

Berdasarkan permasalahan korupsi pada aspek politik yang ada pada pemerintahan, kebebasan beragama yang terkadang dinodai pada bidang pendidikan, adanya kosmetik palsu yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan, serta kekerasan yang terjadi di masyarakat yang mengabaikan pendahuluan musyawarah mufakat tentu menjadi ujian ketahanan ideologi Pancasila. Oleh karena itu

perlu upaya dari berbagai pihak dalam mengatasi masalah tersebut agar tercipta ketahanan. Ketahanan dapat diartikan merupakan cara menjadi sukses dalam hidup meskipun dalam keadaan yang sangat sulit (Savitri, 2022). Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul Ketahanan Ideologi Pancasila dalam Bidang Politik, Pendidikan, dan Kemasyarakatan.

## **Metode**

Pada penelitian Ketahanan Ideologi Pancasila dalam Bidang Politik, Pendidikan, dan Kemasyarakatan ini pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Alasan digunakannya pendekatan kualitatif pada penelitian ini yaitu agar didapatkan data yang konkret, deskriptif dan lengkap mengenai Ketahanan Ideologi Pancasila dalam Bidang Politik, Pendidikan, dan Kemasyarakatan sehingga tujuan pada penelitian ini dapat terwujud. Sedangkan, pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah riset naratif. Naratif pada penelitian ini dituangkan dalam teks yang diambil dan dianalisis dari berbagai sumber pustaka yang ada. Alasan dipilihnya jenis penelitian riset naratif tersebut yaitu agar dapat diperoleh pemahaman mendalam mengenai berbagai data mengenai penelitian yang akan diteliti. Pada penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu sumber data sekunder, sumber data sekunder pada penelitian ini berasal dari buku, jurnal dan surat kabar daring, dan sebagainya.

Pada penelitian ini untuk menjawab Ketahanan Ideologi Pancasila dalam Bidang Politik, Pendidikan, dan Kemasyarakatan teknik analisis data yang peneliti gunakan yaitu model Miles, Matthew, and Huberman

(Miles *et al.*, 1994). Pada model teknik analisis data dalam Ketahanan Ideologi Pancasila dalam Bidang Politik, Pendidikan, dan Kemasyarakatan ini terdiri tiga tahapan yaitu seperti kondensasi data atau *data condensation*, penyajian data atau *display data*, dan penarikan kesimpulan atau *conclusion drawing*. Kondensasi data pada penelitian Ketahanan Ideologi Pancasila dalam Bidang Politik, Pendidikan, dan Kemasyarakatan ini dilakukan dengan memilah data yang telah didapatkan dan melakukan analisis terhadap data tersebut. Setelah itu, data yang dibutuhkan akan dipilah dengan data yang tidak dibutuhkan. Adapun data yang bersifat penting yang dibutuhkan pada penelitian ini yaitu data-data yang berkaitan dengan Ketahanan Ideologi Pancasila dalam Bidang Politik, Pendidikan, dan Kemasyarakatan.

Setelah dilakukan proses kondensasi data, maka yang dilakukan selanjutnya adalah penyajian data. Pada penelitian Ketahanan Ideologi Pancasila dalam Bidang Politik, Pendidikan, dan Kemasyarakatan ini penyajian data secara umum dilakukan dengan terorganisir sehingga informasi yang telah didapatkan mengenai Ketahanan Ideologi Pancasila dalam Bidang Politik, Pendidikan, dan Kemasyarakatan pada saat melakukan penelitian dapat membantu dalam proses penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data yang terdapat pada penelitian kualitatif yang umumnya biasa dilakukan pada berbagai penelitian yaitu dengan menggunakan teks naratif sesuai dengan data yang berkaitan dengan Ketahanan Ideologi Pancasila dalam Bidang Politik, Pendidikan, dan Kemasyarakatan ini. Oleh karena itu data yang didapatkan sesuai dengan judul maupun penyelesaian masalah.

Ketiga penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang bersifat final mungkin akan didapatkan setelah data yang didapatkan lengkap. Oleh karena itu, kesimpulan yang masih awal hanya bersifat sementara sehingga dapat berubah ketika data pendukung yang ada tergolong lebih kuat dalam melakukan penelitian selanjutnya. Tetapi, ketika data yang telah dipaparkan pada tahap awal mengenai Ketahanan Ideologi Pancasila dalam Bidang Politik, Pendidikan, dan Kemasyarakatan tersebut sudah didukung dengan berbagai data yang sifatnya valid maka kesimpulan yang ada bisa menjadi akurat. Pada penarikan kesimpulan dalam penelitian Ketahanan Ideologi Pancasila dalam Bidang Politik, Pendidikan, dan Kemasyarakatan ini yaitu didasarkan pada berbagai data yang sudah didapatkan dan melalui proses analisis saat melakukan serangkaian penelitian.

## **Hasil dan Pembahasan**

1. Peran State Apparatus Terhadap Ketahanan Ideologi Pancasila
- A. Ketahanan Ideologi Pancasila Oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Bidang politik merupakan bidang yang sering disorot dan dikritisi oleh masyarakat apabila terdapat penyimpangan. Penyimpangan yang ada tersebut tentu melanggar konsep yang ada pada Pancasila sehingga dapat pula menimbulkan kisruh. Politik mencakup seluruh hal yang berhubungan dengan perumusan serta pelaksanaan kebijakan publik oleh pemerintah. Di dalam sistem politik suatu negara, hal ini mencakup berbagai aktivitas yang melibatkan penetapan tujuan sistem serta realisasi dari tujuan tersebut. Pada dasarnya, politik merupakan fenomena yang melekat pada kehidupan manusia sebagai makhluk



sosial yang senantiasa dinamis dan berkembang. Oleh karena itu, politik merupakan gejala yang lahir dari proses perkembangan manusia itu sendiri (Makka, 2023).

Pertama, ketahanan dalam bidang politik ditandai dengan adanya pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) suatu lembaga pemerintahan yang langsung berada di bawah koordinasi Presiden. BPIP memiliki tanggung jawab dalam membantu presiden pada saat pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan upaya pembinaan pada bidang Pancasila. Selain itu BPIP juga berperan dalam melakukan koordinasi, sinkronisasi serta proses pengendalian pada saat melakukan pembinaan pada bidang Pancasila secara penuh dan terus menerus. BPIP juga memiliki tanggung jawab dalam proses penyusunan standar pendidikan maupun pelatihan dan rekomendasi pada lembaga negara maupun organisasi masyarakat dan politik maupun berbagai unsur masyarakat mengenai segala hal yang dapat berlawanan dengan ideologi Pancasila. BPIP adalah lembaga yang awalnya dibentuk dengan nama Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP).

Memasuki tahun 2017 tepatnya pada tanggal 19 Mei, Presiden Joko Widodo mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 yang berkaitan dengan UKP PIP. Selanjutnya keberadaan UKP PIP perlu di perbaharui seperti dari segi organisasi atau tanggung jawabnya. Kemudian keberadaan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 di ubah dengan tujuan penguatan pembinaan ideologi Pancasila pada segenap bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu, pada tahun 2018 tepatnya tanggal 28 Februari, Presiden

Joko Widodo melakukan pengesahan pada Peraturan Presiden nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP (Bpip.go.id, 2024). Sehingga hal ini merupakan angin segar dalam penguatan Pancasila yang dilakukan oleh pemerintah.

Adanya peran BPIP terlebih dalam melakukan upaya pembantuan pada presiden pada saat membuat suatu hal yang berkaitan dengan keputusan dalam pendidikan atau bahkan dalam melakukan suatu pelatihan maupun dalam menyampaikan masukan kepada presiden berdasarkan suatu penelitian pada aturan yang tidak sesuai dengan Pancasila pada berbagai lembaga negara, organisasi masyarakat yang ada, serta bagian dari masyarakat lain menggambarkan betapa peran dari BPIP sangat penting dalam memastikan suatu lembaga pemerintahan mampu untuk berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila merupakan suatu indikator dalam menegakkan dan mempertahankan Pancasila agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah.

Peran BPIP dalam memberikan pendidikan dan pelatihan kepada berbagai kementerian/lembaga menjadi modal penyelenggara negara dalam menentukan kebijakan maupun pada saat berinteraksi dengan masyarakat. Hal tersebut senada dengan yang dikemukakan Juwono (2020) bahwa nilai-nilai Pancasila harus terus dijadikan indikator pada saat menjalankan kehidupan di lingkungan masyarakat maupun dalam proses penyelenggaraan negara. Selain itu, pada saat melakukan interaksi dengan segenap individu maupun kelompok dalam wilayah tanah air Indonesia ini harus terus memegang nilai-nilai Pancasila tanpa terkecuali sehingga terwujud kehidupan yang tertib demi keutuhan Negara Kesatuan republik Indonesia.



#### B. Ketahanan Ideologi Pancasila Oleh Badan Kementerian Hak Asasi Manusia

Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) yang diwakili oleh menteri Natalius Pigai mengungkapkan yaitu hadirnya Kementerian HAM sebagai gagasan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjalankan perintah konstitusi yang didalamnya terdapat pesan bahwa bangsa Indonesia harus menghargai dan serta menghormati akan hak asasi manusia setiap orang yang dijamin oleh negara. Natalius Pigai juga mengungkapkan bahwa hadirnya Kementerian HAM menggambarkan kepedulian Presiden Prabowo Subianto dalam menguatkan prinsip bahwa negara harus hadir dalam menjamin keberadaan hak asasi manusia bagi segenap bangsa Indonesia. Kementerian HAM merupakan nomenklatur yang baru sebagai pecahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada kepemimpinan presiden Prabowo Subianto (Mulya, 2024).

#### C. Ketahanan Ideologi Pancasila Oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan lembaga independen yang posisinya sejajar dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), akan tetapi wewenang yang dimiliki hanya terbatas dan dapat dilaksanakan dengan cara periodik. Pada MPR juga terdapat wewenang yang sifatnya utama seperti melakukan pelantikan kepada Presiden dan Wakil Presiden, berwenang merevisi dan memberi ketetapan terhadap Undang-Undang Dasar, dan dapat melakukan pemberhentian terhadap Presiden dan Wakil Presiden (Efendi, 2023).

Keberadaan MPR tidak semuanya memegang peran dalam pelaksana kedaulatan rakyat seperti yang terdapat pada Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 hasil perubahan ketiga, pada

pasal tersebut dikatakan bahwa kedaulatan yang ada berada di tangan rakyat serta proses pelaksanaannya harus mengacu pada Undang-Undang Dasar. Terdapat suatu ketentuan yang membahas tentang keanggotaan MPR seperti yang terdapat pada Pasal 2 Ayat (1) UUD 1945, pada pasal tersebut dikatakan bahwa MPR terdiri dari anggota yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Pada proses keanggotaan MPR dilakukan melalui jalur pemilihan umum sesuai peraturan yang sudah terdapat pada undang-undang. Tugas maupun wewenang MPR terdapat secara lebih detail pada pasal 4 serta pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD seperti yang telah direvisi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.

Pada Undang-Undang tersebut terdapat beberapa ketentuan seperti MPR mempunyai tanggung jawab seperti, melakukan sosialisasi terhadap ketetapan yang telah dilakukan oleh MPR, memberikan dan menguatkan pengetahuan bidang Pancasila pada masyarakat, UUD RI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, melaksanakan proses pengkajian pada sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, dan menyerap masukan masyarakat mengenai proses pelaksanaan UUD 1945 (Mpr.go.id, 2025).

#### D. Ketahanan Ideologi Pancasila Oleh Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah

Pendidikan adalah suatu bentuk tindakan yang dilakukan melalui rencana untuk membuat suatu suasana maupun aktifitas pembelajaran yang dapat membantu peserta

didik untuk bisa lebih aktif pada saat pembelajaran sesuai kemampuan khas yang dimiliki. Dengan adanya pendidikan, maka peserta didik diupayakan dapat meningkatkan pengetahuan agama, watak, pengetahuan, sikap, maupun keahlian yang dimiliki yang diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat maupun negara (Abd Rahman, 2022).

Pendidikan dapat dikatakan sebagai sesuatu yang penting pada saat menjalankan kehidupan di zaman yang serba teknologi dan globalisasi ini. Pendidikan dapat dilalui baik melalui pendidikan yang sifatnya formal maupun pendidikan yang sifatnya non formal, selain itu pendidikan juga dapat berasal dari keluarga yang juga sifatnya informal. Seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang latar belakang atau asal-usul keluarga, dianjurkan untuk mengikuti program pendidikan yang tersedia. Walaupun jalur pendidikan yang diambil berbeda-beda, baik formal, nonformal, maupun informal, tujuannya tetap sama, yaitu memberikan kesempatan bagi seluruh warga untuk memperoleh pendidikan demi meningkatkan kualitas mereka sebagai sumber daya manusia yang bermanfaat. Selain itu, jalur pendidikan juga menjadi sarana pengembangan diri peserta (Syaadah, 2022).

Daya saing pendidikan suatu bangsa dapat dimaknai sebagai kemampuan negara dalam membangun sistem pendidikan yang efisien, inklusif, dan berkualitas tinggi, sehingga mampu melahirkan individu yang berpengetahuan, terampil, dan memiliki kompetensi untuk bersaing di pasar global. Hal ini mencakup kemampuan memberikan akses pendidikan yang merata, mendorong inovasi dalam metode pembelajaran dan kurikulum, serta menghasilkan lulusan dengan keterampilan yang relevan dan kompetitif di berbagai sektor kehidupan nyata. Pada

hakikatnya, pendidikan memegang peran sangat penting dalam menentukan tingkat daya saing bangsa. Pendidikan yang bermutu menjadi kunci utama untuk menghadapi tantangan persaingan global, sedangkan pendidikan yang berkualitas rendah justru menjadi hambatan bagi kemajuan bangsa di berbagai aspek kehidupan (Sanga & Wangdra, 2023).

Bidang pendidikan merupakan bidang yang mempunyai berbagai lembaga dan program dalam penguatan Pancasila. Hal tersebut pertama seperti pada pusat penguatan karakter kementerian pendidikan dasar dan menengah. Pusat penguatan karakter memiliki berbagai program seperti gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan, pencegahan perundungan dan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, penguatan kebhinekaan di lingkungan satuan pendidikan, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi, penguatan inklusivitas dan kebhinekaan.

Berbagai program yang dilakukan oleh pusat penguatan karakter tersebut terutama yang menekankan kebhinekaan yang termuat dalam 2 bagian poin yang sudah disebutkan tersebut mengajarkan betapa pentingnya persatuan dalam keberagaman. Persatuan dalam keberagaman dikehendaki dalam sila ketiga Pancasila, yang mendorong persatuan Indonesia dalam keberagaman yang ada. Pancasila adalah ideologi yang sifatnya dinamis dan menyesuaikan sehingga diharapkan dapat bermanfaat sesuai perkembangan zaman. Pada Pancasila terkandung rasa kebersamaan dalam melestarikan persatuan dari ancaman para kaum radikalisme maupun terorisme. Nilai sila pertama sampai kelima yang terdapat

pada sendi-sendi Pancasila adalah hasil ide bersama yang ditegakkan di atas perbedaan (Fathani, 2020).

Upaya pemerintah melalui pusat penguatan karakter kementerian pendidikan dasar dan menengah seperti dengan adanya program pencegahan perundungan merupakan suatu bentuk upaya pemerintah dalam memahat karakter generasi muda agar dapat menyesuaikan perilaku dengan baik sesuai nilai-nilai Pancasila dengan menghindari perundungan karena tidak sesuai dengan sila kedua Pancasila yaitu nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal tersebut senada dengan yang dikemukakan Ridanpää (2022) yaitu jika suatu negara dapat memahat potensi pemudanya dengan baik maka percayalah suatu negara tersebut akan juga bisa mengukir karya yang sifatnya monumental bagi pembangunan bangsa dan negara yang ada.

Kedua, program yang dilakukan oleh dinas pendidikan. Keberadaan pendidikan nonformal erat kaitannya dengan lembaga penyelenggaranya. Salah satu lembaga tersebut adalah Sanggar Kegiatan belajar (SKB) yang dapat dikatakan sebagai suatu pendidikan yang sifatnya non formal yang memiliki tanggung jawab dalam mengajarkan maupun meningkatkan suatu model pembelajaran formal maupun non formal yang berada pada suatu kabupaten atau pada suatu kota. SKB memiliki perbedaan dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), PKBM dibuat maupun dijalankan oleh suatu masyarakat yang ada pada lingkungan tersebut. SKB merupakan suatu bentuk turunan dari dinas pendidikan yang bertanggung jawab pada dinas pendidikan. SKB memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kualitas bahan ajar yang dapat bersumber dari budaya lokal berdasarkan dari

masukin dinas pendidikan kabupaten atau kota tempatnya bernaung.

Surat Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 023/ O/1997 menyebutkan bahwa tugas pokok SKB “Melaksanakan pembuatan percontohan dan pengendalian mutu pelaksanaan program Pendidikan Luar Sekolah, berdasarkan kebijakan teknis Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga”. Berbagai jenis pendidikan yang sifatnya non formal yang biasanya diselenggarakan pada SKB seperti Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Kesetaraan, maupun pendidikan lain yang dapat membuat peningkatan kualitas tenaga pengajar yang dapat dikategorikan dalam non formal (Shomedran & Nengsih, 2020) .

Adanya SKB yang dibuat oleh dinas pendidikan merupakan salah satu upaya dalam melestarikan muatan lokal sebagai bentuk kecintaan terhadap budaya sehingga hal tersebut juga berkaitan dengan sila ketiga Pancasila dimana nilai yang terkandung didalamnya salah satunya yaitu cinta terhadap budaya dan produk lokal bangsa Indonesia. Oleh karena itu langkah dinas pendidikan ini juga sebagai transformasi sosial yang ada pada bidang pendidikan guna penguatan dan ketahanan nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut senada dengan yang dikemukakan Sudrajat & Samsuri (2019) bahwa pengaktualisasian Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara diharapkan terus membimbing dalam transformasi sosial seperti pada bidang keyakinan, bidang pengetahuan serta dalam hal tindakan.

## 2. Peran *Civil Society* Terhadap Ketahanan Ideologi Pancasila

### A. Ketahanan Ideologi Pancasila Oleh Pemuda Pancasila

Masyarakat dapat diartikan dalam konteks sekelompok orang yang memiliki kemampuan komunikasi serta memiliki suatu hal yang bersifat penting antar masyarakat yang ada. Adanya masyarakat dapat tercipta dikarenakan sebagai manusia mereka memiliki suatu bentuk perasaan, kemampuan dalam berpikir, serta kepedulian terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Pada suatu masyarakat terdapat interaksi, komunikasi, serta rasa kekompakan dalam membangun suatu tempat tinggalnya. Adanya suatu bentuk masyarakat ini dapat dilihat dengan adanya rasa kekeluargaan antar individu serta peraturan yang ada, sehingga masyarakat tidak dianggap sekedar perkumpulan orang saja. Masyarakat adalah suatu bentuk sistem yang ada pada masyarakat itu sendiri yang dapat mendatangkan hubungan kebersamaan dalam menjalankan suatu kehidupan pada masyarakat itu sendiri (Yusuf et al., 2020).

Pada masyarakat, penanaman ideologi Pancasila menjadi begitu penting demi menjaga kelestarian dan kestabilan negara. Berbagai upaya masyarakat dalam membina dan mempertahankan ideologi Pancasila misalnya dengan adanya ormas Pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila merupakan organisasi masyarakat yang dibentuk pada tanggal 28 Oktober tahun 1959. Pemuda Pancasila digagas oleh Jendral Abdul Haris Nasution, pada saat awal pembentukan, organisasi Pemuda Pancasila bernama Pemuda Patriotik, Pemuda Patriotik pada saat itu memiliki fungsi sebagai sayap pembantu dari Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia. Pemuda Pancasila pernah meraih penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) pada bidang Ikrar Sumpah Pemuda dengan jumlah massa terbanyak dari organisasi kemasyarakatan. Selain itu,

Pemuda Pancasila juga pernah meraih MURI pada bidang Ikrar Anti Narkoba dengan massa terbanyak pula. Pemuda Pancasila juga pernah berkontribusi pada saat erupsi Gunung Semeru di Lumajang dengan memberikan bantuan sehingga hal tersebut juga menjadi bagian kepedulian Pemuda Pancasila pada rakyat Indonesia (Fadilah, 2025).

Para anggota Pemuda Pancasila yang melakukan kegiatan bakti sosial pada saat erupsi gunung semeru ini menandakan bahwa jiwa sosial maupun kemanusiaan yang meliputi kepedulian terhadap sesama membuktikan bahwa organisasi ini juga penting dalam mempertahankan nilai-nilai Pancasila terlebih sila kedua. Hal tersebut selaras dengan yang dikemukakan Robert & Mulyadi (2021) bahwa pengaktualisasian berbagai nilai yang ada pada Pancasila dalam kehidupan berbangsa adalah hal yang sifatnya vital guna mengatasi berbagai masalah mengenai kemanusiaan. Sila kedua Pancasila berisi ajaran-ajaran agar bangsa Indonesia dapat memanusiakan manusia yang lain, apabila manusia lain terkena masalah maupun musibah maka dalam menyelesaikan atau menangani hal tersebut harus mengutamakan sisi kemanusiaan dengan ikhlas.

Adanya ormas Pemuda Pancasila yang dengan sukarela melakukan penanaman pendidikan Pancasila kepada anggotanya merupakan bukti kecintaan suatu bangsa Indonesia kepada negaranya. Oleh karena itu hal ini juga dapat memperkuat nasionalisme yang ada pada masyarakat indonesia, hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan McDaniel (2017) bahwa Pancasila bertujuan untuk membangun nasionalisme. Selain itu, dengan adanya ormas pemuda Pancasila ini diharapkan agar dapat menjadi pengingat bahwa Pancasila dalam

masyarakat begitu penting agar segala tingkahlaku yang ada pada masyarakat dapat dikontrol sesama masyarakat yang tetap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan Rahma & Dewi (2021) yaitu segala tingkahlaku yang terdapat pada bangsa Indonesia harus berasaskan Pancasila sehingga Pancasila bisa menjadi pancaran dalam berkehidupan. Nilai-nilai dalam Pancasila pada penguatannya adalah suatu keharusan yang perlu diterapkan terlebih pada saat menjalankan hidup bermasyarakat dan hidup bernegara (Rukmana et al., 2020).

Meskipun Pemuda Pancasila seringkali terlibat permasalahan seperti bentrokan Pemuda Pancasila dan Forum Betawi Rempug (FBR) pada 4 Februari 2021, bentrokan di Ciledug, Tangerang Kota pada 19 November 2022 dikarenakan diduga ada unsur perebutan penguasaan lahan, serta insiden penganiayaan AKBP Dermawan Karosekali saat unjuk rasa di depan gedung DPR/MPR RI pada 25 November 2021. Namun, hal tersebut menjadi koreksi untuk para pimpinan pemuda Pancasila dalam membenahi para anggota, hal tersebut juga dikarenakan para anggota pemuda Pancasila Sebagian berasal yang sehari-harinya hidup di jalan sehingga hal tersebut perlu untuk dibenahi dan diperbaiki. Mengingat, Pemuda Pancasila merupakan suatu wadah untuk mempertahankan kecintaan pada Pancasila di Tengah masyarakat.

Aksi bakti sosial yang dilakukan oleh Pemuda Pancasila juga dapat mendukung ketahanan nasional guna mempercepat pemulihan kehidupan dan ekonomi masyarakat. Hal tersebut senada

dengan yang dikemukakan Mileaningrum et al., (2023) ketahanan nasional adalah suatu pola yang ada untuk mengatur serta memastikan kesejahteraan maupun kepastian aman bangsa Indonesia. Oleh karena itu segala ketahanan yang dengan keutuhan negara perlu kerjasama dari berbagai pihak.

#### B. Ketahanan Ideologi Pancasila Oleh Pelaku Usaha.

Kewirausahaan adalah suatu proses menciptakan hal-hal baru yang unik atau berbeda dari yang sudah ada secara inovatif dan mampu memberikan nilai tambah. Selain itu, kewirausahaan berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara itu, pemberdayaan menjadi sarana bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam berbagai kegiatan (Darwis et al., 2022). Kewirausahaan mencerminkan kemampuan untuk berpikir kreatif dan bertindak inovatif, memiliki kepekaan dalam melihat peluang, serta bersikap terbuka terhadap masukan dan perubahan positif yang dapat mendorong pertumbuhan dan nilai dalam bisnis. Inovasi tidak hanya dipicu oleh perubahan dan kebutuhan untuk beradaptasi, tetapi juga oleh kesadaran akan adanya kesenjangan antara kondisi aktual dan kondisi ideal antara harapan masyarakat dengan apa yang telah disediakan oleh pemerintah, sektor swasta, maupun LSM. Dengan demikian, kewirausahaan dapat dipahami sebagai suatu fungsi yang berperan dalam memanfaatkan peluang-peluang yang ada di pasar (Nirmayani, 2023).

Masyarakat Ekonomi Asia atau yang biasa disebut MEA adalah suatu bentuk Kerjasama antar kepala negara di Asia yang menghendaki adanya perdagangan yang sifatnya bebas, masyarakat di Asia dapat

secara leluasa memperjualbelikan barang hasil produksinya. MEA dibuat dengan maksud dan tujuan untuk mengembangkan perekonomian negara yang ada pada wilayah Asia serta suatu upaya dalam menjaga kestabilan perekonomian masyarakat di Asia yang dapat meningkatkan kekuatan ekonomi di wilayah Asia. Selain itu, MEA juga diharapkan mampu untuk dapat mengurangi angka masyarakat yang dapat dikategorikan miskin di wilayah Asia, memperkuat kerja sama ekonomi, serta mendorong pembangunan ekonomi di kawasan. Dengan diberlakukannya MEA, seluruh negara ASEAN harus bersatu dalam satu pasar bebas lintas teritori, menyatukan pasar kawasan menjadi satu kesatuan. Hal ini memberi peluang bagi perusahaan-perusahaan di Asia Tenggara untuk memperluas jangkauan operasionalnya dengan lebih leluasa (Ningsih, 2022). Saat ini, Indonesia telah memasuki era pasar bebas. Pasar bebas merupakan bentuk pasar di mana kebijakan ekonomi tidak menjadi acuan utama dalam kegiatan jual beli. Sesuai istilahnya, setiap pihak memiliki kebebasan untuk melakukan aktivitas ekonomi dan menetapkan kebijakannya sendiri. Keberadaan pasar bebas turut dipengaruhi oleh arus globalisasi, yang menyatukan dunia sehingga batas-batas antarnegara semakin berkurang, termasuk dalam bidang perekonomian (Damayanti, 2021). Kebebasan tersebut membuat kita perlu menyaringnya melalui nilai-nilai Pancasila.

Kewirausahawan yang ada dapat berkontribusi dalam kemajuan maupun kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dapat ditempuh melalui adanya dana. Pada Perusahaan terdapat alokasi dana yang diberikan kepada masyarakat seperti dana *Corporate Social Responsibility* (CSR), hal

tersebut bertujuan untuk kemajuan masyarakat sehingga perusahaan bukan hanya untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya tetapi juga untuk mengembangkan perekonomian masyarakat sekitar. Salah satu tujuan dari pelaksanaan CSR adalah menciptakan masyarakat yang mandiri dan berdaya, terutama komunitas yang berada di lingkungan sekitar Perusahaan (Saleh & Sihite, 2020). Hal tersebut juga sejalan dengan Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab yang salah satu nilai yang terkandung didalamnya adalah mengembangkan sikap cinta kepada sesama (Utari et al., 2023). Adanya kepedulian terhadap lingkungan ini merupakan suatu perbuatan yang menghargai hak orang lain sehingga tidak berperilaku sewenang-wenang terhadap alam yang dapat berimbas ke orang lain (Hadi, 2025)

Pelaku usaha juga bisa mempertahankan Pancasila melalui jalur pajak. Pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh masyarakat dan menjadi salah satu sumber utama pendapatan negara, yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai kegiatan pembangunan serta operasional pemerintahan. Pendapatan dari sektor pajak merupakan komponen terbesar dalam penerimaan domestik. Seiring meningkatnya kebutuhan pembiayaan negara, pemerintah dituntut untuk mengoptimalkan penerimaan, salah satunya melalui pendapatan pajak (Permata, 2022). Oleh karena itu, kewajiban membayar pajak ini juga bagian dari sila ketiga Pancasila yaitu sila Persatuan Indonesia yang salah satu nilai terkandung didalamnya adalah memelihara kecintaan pada bangsa dan negara Indonesia.

Pelaku usaha dapat mempertahankan Pancasila melalui perhatian terhadap alam. Kewajiban kewirausahaan kepada alam

berdasarkan perspektif Pancasila merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan oleh pengusaha dengan memperhatikan kelestarian alam, menghindari tercemarnya alam, menghindari kerusakan alam, dan sebagainya yang dapat mendatangkan bencana serta kerugian terhadap alam dan masyarakat. Hal tersebut seperti dapat dilakukan dengan mematuhi berbagai aturan maupun kepedulian terhadap lingkungan.

Untuk melindungi keberadaan alam serta kelestarian alam, hal yang perlu diperhatikan yaitu adanya izin sebagai control dalam penggunaan alam. Perizinan ini berfungsi sebagai acuan bagi para pelaku usaha dalam mengelola lingkungan secara bertanggung jawab. Salah satu syarat penting dalam perizinan lingkungan adalah kewajiban untuk memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), yang berperan sebagai alat pencegahan terhadap pencemaran lingkungan. Ketentuan ini telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga menjadi kewajiban hukum bagi seluruh warga negara. Dengan demikian, suatu izin lingkungan hanya dapat diterbitkan apabila dokumen AMDAL telah dimiliki terlebih dahulu. Kewajiban wirausahawan dalam menjaga alam ini merupakan bagian dari menjaga negara Indonesia serta termasuk dalam sila ketiga Pancasila yang salah satu nilai yang terkandung didalamnya yaitu memelihara kecintaan pada bangsa dan negara Indonesia (Utari et al., 2023).

### C. Ketahanan Ideologi Pancasila Oleh Media Massa

Teknologi informasi dan komunikasi merupakan penerapan pengetahuan dan keterampilan untuk menyampaikan informasi atau pesan dengan tujuan memecahkan masalah dan mencapai komunikasi yang

efektif. Perkembangan teknologi ini berlangsung pesat dan akan terus berlanjut dari waktu ke waktu, dengan tingkat penggunaan yang semakin meningkat serta membawa dampak baik maupun buruk. Adanya kemajuan dibidang teknologi informasi pada saat ini merupakan suatu yang telah nyata. Pada zaman dahulu, teknologi secara sederhana dapat dilihat pada saat manusia zaman prasejarah menggunakan teknologi dalam memahat dinding-dinding gua yang bermotif berbagai bentuk. Bentuk-bentuk gambar tersebut juga dapat dikategorikan sebagai suatu informasi pada zaman dahulu seperti cara berburu maupun daftar Binatang yang dapat dijadikan hewan buruan. Pada era modern ini, keberadaan teknologi dapat dikatakan sebagai perkembangan yang begitu pesat, salah satunya yaitu keberadaan teknologi informasi seperti media massa yang mudah diakses Dimana saja dan kapan saja secara daring (Munti & Syaifuddin, 2020).

Perkembangan media sosial maupun media massa membuat beberapa kasus hoaks pernah terjadi. Hal ini terjadi karena para pembuat hoaks semakin mahir dalam meyakinkan pembacanya. Contoh pertama adalah kasus hoaks “Jokowi Menyanyikan Asmalibrasi”. Pada berbagai konten media sosial viral rekaman suara yang mirip dengan suara Presiden Joko Widodo yang sedang menyanyikan lagu berjudul Asmalinrasi yang dibawakan oleh Soegi Bornean. Namun berdasarkan fakta yang ada rekaman suara yang mirip Presiden Joko Widodo tersebut merupakan hasil dari *artificial intelligence* (AI). Pada mulanya rekaman suara mirip Presiden Joko Widodo tersebut tersebar di Twitter, kemudian banyak orang yang



mengira bahwa suara tersebut merupakan suara Presiden Joko Widodo.

Terdapat kasus lain yang terkategori hoaks yaitu berita bohong terkait kehadiran Ida Dayak di Kota Semarang. Para warga terkena tipu tentang informasi kehadiran Ida Dayak untuk melakukan pengobatan di Masjid Agung Kauman. Informasi yang beredar Ida Dayak akan hadir pada tanggal 8 Mei 2023. Para warga masyarakat banyak yang merapat ke tempat tersebut, akan tetapi informasi tersebut disebarkan oleh orang yang tidak memiliki kewenangan dalam menyampaikan kebenaran akan hal tersebut. Kasus yang lain juga yaitu seperti kasus berita bohong tentang sebaran email palsu mengenai pajak. Email palsu tersebut berisi informasi tentang kewajiban membayar pajak. Email palsu tentang kewajiban membayar pajak tersebut beredar di wilayah Jawa Tengah. Dengan adanya berita tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan konferensi pers pada 5 Mei 2023 terkait berita tersebut dan mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati.

Adanya kasus berita bohong pada media massa tersebut mendorong peran pemerintah dalam meluruskan berita bohong melalui media massa pula seperti yang pernah dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada kasus sebaran email palsu. Adanya upaya media massa dalam meluruskan berita bohong ini juga sejalan dengan sila kedua Pancasila yaitu Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab dimana salah satu nilai yang terkandung didalamnya adalah memiliki keberanian untuk memperjuangkan kebenaran serta keadilan (Utari et al., 2023).

### 3. Kritik Terhadap Ketahanan Ideologi Pancasila

#### A. Kritik Terhadap Ketahanan Ideologi Pancasila Oleh *State Apparatus*

Aparatur negara memiliki peran yang penting dalam ketahanan ideologi Pancasila, namun kenyataannya terdapat juga kementerian yang berkinerja buruk. Berdasarkan hasil observasi, Kementerian Hak Asasi Manusia merupakan kementerian yang kinerjanya tidak jelas dan tidak populer di masyarakat. Kementerian Hak Asasi Manusia masih kurang kritis dalam menanggapi berbagai masalah hak. Asasi manusia pada berbagai kasus terkini yang terjadi di Indonesia.

Menurut laporan Center of Economic and Law Studies atau Celios sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih mendapat nilai rapor merah. Lima indikator penilaian dalam studi ini adalah pencapaian program, kesesuaian rencana kebijakan dengan kebutuhan publik, kualitas kepemimpinan dan koordinasi, tata kelola anggaran, serta komunikasi kebijakan.

Menteri dengan kinerja terburuk adalah Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai. Menurut studi tersebut, kinerja Pigai mendapatkan nilai minus 113 poin. Skor terendah dalam evaluasi ini diraih oleh Natalius Pigai (Menteri HAM) dengan nilai mendekati -150. Skor ini mengindikasikan adanya kritik yang signifikan terhadap kebijakan di bidang HAM, karena beragam kontroversi atau kurangnya terobosan yang dilakukan (Muhid, 2025).

Natalius pigai juga pada berbagai kesempatan kurang proaktif ataupun hadir dalam berbagai isu pelanggaran HAM yang sering viral di masyarakat maupun di media sosial sehingga hal tersebut juga menjadi keprihatinan sebagai masyarakat dalam

melihat kinerja maupun kondisi bangsa ini yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Harusnya percepatan penanganan masalah hak asasi manusia harus dilakukan secara cepat dan tepat agar dapat memberikan rasa damai dan kepastian perlindungan terhadap masyarakat sehingga dapat berguna juga bagi pertahanan negara dengan adanya jaminan terhadap hak asasi manusia.

Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia dapat memberikan kejelasan terhadap masyarakat mengenai berbagai permasalahan yang dihadapi. Adanya penyelesaian pada hak asasi manusia tentu dapat mendukung ketentraman sehingga dapat juga menstabilkan pertahanan nasional. Hal tersebut senada dengan yang dikemukakan Sarjito (2023) bahwa kebijakan pertahanan harus dikembangkan dan direvisi untuk menyeimbangkan keamanan nasional dengan hak asasi manusia. Mekanisme seperti kepatuhan hukum, penilaian dampak, pelatihan, pemantauan, penggunaan kekuatan secara proporsional, perlindungan terhadap penyiksaan, transparansi, akuntabilitas, dan kerja sama internasional dapat membantu mencapai keseimbangan ini.

#### B. Kritik Ketahanan Ideologi Pancasila Pada Civil Society

Ketahanan ideologi Pancasila oleh *civil society* merupakan kemampuan bangsa Indonesia, khususnya elemen masyarakat dalam menjaga, mempertahankan, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Namun, pada *civil society* juga terdapat permasalahan seperti yang ada pada kelompok masyarakat seperti organisasi kemasyarakatan (ORMAS) seperti pada ORMAS Pemuda Pancasila.

Pada beberapa kasus Pemuda Pancasila seringkali membuat keributan maupun keonaran. Pada Daerah Khusus Jakarta, Polda Metro Jaya menangkap 30 anggota dan pengurus organisasi masyarakat Pemuda Pancasila (PP). Puluhan anggota PP itu diduga melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap vendor pengelola parkir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tangerang Selatan.

Anggota Pemuda Pancasila diketahui nyaris bentrok dengan sejumlah orang dari PT Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI). Kepolisian menyebut para tersangka menghalangi aktivitas legal perusahaan pemenang tender sewa lahan parkir milik pemerintah daerah. Pemuda Pancasila diduga telah menguasai lahan parkir RSUD selama delapan tahun. Saat vendor yang sah hendak bekerja, mereka diintimidasi (Setiawanty, 2025).

Pada 05 Februari 2025, hal yang tentu menggemparkan Pemuda Pancasila juga terjadi. Pada saat itu sejumlah elite atau pimpinan organisasi Pemuda Pancasila (PP) terseret dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) eks Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari belakangan ini. KPK menggeledah rumah Japto di Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Selasa 4 Februari 2025. Usai penggeledahan, KPK menyita barang bukti dari rumah Japto terdiri dari sebelas mobil, dokumen, uang rupiah dan asing serta Barang Bukti Elektronik (BBE) (Kid, 2025).

Adanya kasus korupsi yang melibatkan pemimpin Pemuda Pancasila yaitu Japto tentu juga menjadi salah satu indikator yang dapat mengganggu pelayanan maupun kesejahteraan masyarakat sehingga kestabilan maupun pertahanan negara juga akan berdampak. Hal

tersebut senada dengan yang dikemukakan Weda (2021) bahwa Korupsi di Indonesia dapat diibaratkan sebagai penyakit yang menyebar. Jika situasi ini terus dibiarkan, maka akan menghambat proses pembangunan serta membahayakan keutuhan negara, karena dampaknya merambah ke seluruh aspek kehidupan.

Korupsi yang dilakukan oleh salah satu pimpinan ormas Pemuda Pancasila dapat berdampak serius terhadap kepercayaan public terhadap ormas ini, efektivitas bantuan sosial yang disalurkan pemerintah, maupun stabilitas sosial-politik di masyarakat. Ketika ormas menyelewengkan dana pemerintah tindakan ini tentu akan mencoreng citra ormas sebagai agen perubahan dan melemahkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial.

## Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini yaitu didapatkan data bahwa peran berbagai pihak dalam ketahanan ideologi Pancasila begitu penting dalam terjaga dan kuatnya penanaman Pancasila mulai dari instansi pemerintah sampai pada masyarakat juga dibutuhkan dalam menjaga ketahanan nasional yang selaras dengan pancasila. Oleh karena itu penting disadari bahwa begitu penting kerjasama pemerintah dalam menjaga ketahanan nasional yang berbasis Pancasila.

## Referensi

- Abd Rahman, B. P. . M. S. A. . F. A. . K. Y. . & Y. Y. (2022). Pengertian Pendidikan Ilmu Pendidikan Da. *L-Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam*, 2(1), 1–8.
- Antari, L. P. S. (2018). Implementasi nilai-nilai pancasila pada tari kecak. *Jurnal Stilistika*, 7(1), 57–74.  
<https://doi.org/10.5281/zenodo.3895330>

- Aqil Teguh Fathani1, E. P. P. (2020). Implementasi nilai Pancasila dalam menekan radikalisme agama. *Mimbar Keadilan*, 13(2).
- Aris Sarjito. (2023). Sinkronisasi kebijakan pertahanan dalam operasi militer dengan hak asasi manusia. *Journal of Governance and Policy Innovation (JGPI)*, 3, 17–41.
- Bpip.go.id. (2024). Profil lembaga. *Bpip.Go.Id*. <https://bpip.go.id/tentang-bpip>
- Damayanti, N. R. (2021). Mengenal pasar bebas: pengertian, fungsi, hingga dampaknya bagi Indonesia. *DetikEdu*.
- Darwis, R. S., Miranti, Y. S., Saffana, S. R., & Yuandina, S. (2022). Kewirausahaan sosial dalam pemberdayaan masyarakat. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 4(2), 135.  
<https://doi.org/10.24198/focus.v4i2.37495>
- Dewi, D. K., & Sunarso, S. (2020). Strategi pembentukan ketahanan pribadi siswa berbasis nilai-nilai Pancasila untuk membangun kesadaran bernegara (Studi Di SMA Taruna Nusantara Magelang Jawa Tengah). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 26(1), 87.  
<https://doi.org/10.22146/jkn.53132>
- Efendi, A. (2023). Kekuasaan Majelis Permusyawaratan Rakyat: Problematik Dan Penataan. *Veritas et Justitia*, 9(2), 377–398.  
<https://doi.org/10.25123/vej.v9i2.6763>
- Fadilah, R. (2025). Sejarah pemuda Pancasila. *Antara News*.  
<https://www.antaranews.com/berita/4693753/sejarah-pemuda-pancasila>
- Gabriela, M. (2024). No Title. *Tempo.Co*.
- Hadi, A. S. (2025). Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam penguatan nasionalisme pada Duta Damai Yogyakarta. *JURNAL MORAL KEMASYARAKATAN*, 10(2), 788–807.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.21067/jmk.v10i2.11775>
- Ihsan, D. (2021, January 24). Kejadian SMKN 2 Padang, mendikbud: langgar UU dan nilai Pancasila. *Kompas.Com*.
- Jagad, A. B. (2024). Upaya deradikalisme dalam lingkungan sekolah dan implikasinya terhadap ketahanan ideologi. *Journal of Educational and Counseling Guidanc*.
- Juwono, H. (2020). Penguatan nilai Pancasila di tengah disrupsi moral generasi. *MOMENTUM : Jurnal Sosial*

- Dan Keagamaan, 9(2), 234–247.  
<https://doi.org/10.29062/mmt.v9i2.97>
- Kamil, I. (2023, November 8). Johnny G Plate dkk rugikan negara Rp 8,03 triliun di kasus BTS 4G, baru dikembalikan Rp 1,7 triliun. *Kompas.Com*.
- Kid. (2025). Tiga elite Pemuda Pancasila terseret kasus eks bupati Kukar Rita. *Tempo.Co*.
- Latif, Y. (2020). *Wawasan Pancasila Pancasila bintang penuntun untuk pembudayaan*. Mizan.
- Makka, S. A. (2023). Apa itu politik? berikut pengertian, tujuan, dan contoh perilakunya. *Detik News*.
- Matthew B. Miles, A. M. H. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. SAGE Publications Inc.
- McDaniel, J. (2017). Religious change and experimentation in Indonesian Hinduism. *International Journal of Dharma Studies*, 5(1).  
<https://doi.org/10.1186/s40613-017-0056-x>
- Mileaningrum, A., Radityawara Hidayat, E., Legowo, E., Widodo, P., & Sukendro, D. A. (2023). Peningkatan ketahanan keluarga (family resilience) sebagai bagian dari perwujudan ketahanan nasional. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 435–440.  
<https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/4812>
- Mpr.go.id. (2025). Kedudukan, tugas dan wewenang MPR. *Mpr.Go.Id*.  
<https://mpr.go.id/tentang-mpr/Kedudukan,-Tugas,-dan-Wewenang>
- Muhid, H. K. (2025). 10 Menteri di kabinet merah putih dengan kinerja terburuk dalam 100 hari kerja menurut celios. *Tempo.Co*.
- Mulya, F. P. (2024). Pembentukan kementerian HAM bukti presiden jalankan amanat konstitusi. *Antara News*.
- Murtadho, M. Al. (2025). Bongkar pabrik narkoba di Sentul City yang produksi tembakau sintetis rp 350 miliar, polisi kejar dua dpo. *Tempo.Co*.  
[https://www.tempo.co/hukum/bongkar-pabrik-narkoba-di-sentul-city-yang-produksi-tembakau-sintetis-rp-350-miliar-polisi-kejar-dua-dpo-1203348#goog\\_rewarded](https://www.tempo.co/hukum/bongkar-pabrik-narkoba-di-sentul-city-yang-produksi-tembakau-sintetis-rp-350-miliar-polisi-kejar-dua-dpo-1203348#goog_rewarded)
- Ningsih, W. L. (2022, January 6). Masyarakat ekonomi ASEAN (MEA): pembentukan, tujuan, dan manfaat. *Kompas.Com*.
- Nirmayani, H. (2023). Menumbuhkan jiwa kewirausahaan melalui koperasi mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 15(1).
- Permata, M. I. (2022). Pengaruh pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Maumere. *Co-Creation : Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Akuntansi Dan Bisnis*, 1(2), 6–13.  
<https://doi.org/10.55904/cocreation.v1i2.352>
- Rahma, D., & Dewi, D. A. (2021). Aktualisasi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. *Jurpis: Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 18(1), 63–74.
- Ridanpää, J. (2022). ‘Carbon footprint nationalism’: re-conceptualizing Finnish nationalism and national pride through climate change discourse. *National Identities*, 24(4), 429–446.  
<https://doi.org/10.1080/14608944.2021.1937974>
- Robert, R., & Mulyadi, B. (2021). Aktualisasi nilai Pancasila sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam Tradisi Senguyun. *Jurnal Borneo Humaniora*, 4(1), 33–38.  
[https://doi.org/10.35334/borneo\\_humaniora.v4i1.1945](https://doi.org/10.35334/borneo_humaniora.v4i1.1945)
- Rukmana, I. S., Samsuri, S., & Wahidin, D. (2020). Aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai contoh nyata ketahanan ideologi (studi di Kampung Pancasila, Dusun Nogosari, Desa Tirirenggo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 26(2), 182.  
<https://doi.org/10.22146/jkn.53815>
- Rusnaini, R., Raharjo, R., Suryaningsih, A., & Noventari, W. (2021). Intensifikasi profil pelajar Pancasila dan implikasinya terhadap ketahanan pribadi siswa. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 27(2), 230.  
<https://doi.org/10.22146/jkn.67613>
- Saleh, A., & Sihite, M. (2020). Strategi komunikasi untuk program corporate social responsibility dalam pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Interaksi : Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(1), 98–105.  
<https://doi.org/10.30596/interaksi.v4i1.4134>
- Sanga, L. D., & Wangdra, Y. (2023).

- Pendidikan Adalah Faktor Penentu Daya Saing Bangsa. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial Dan Teknologi (SNISTEK)*, 5(September), 84–90. <https://doi.org/10.33884/psnistek.v5i.8067>
- Sari, A. R. (2025). Modus penipuan kosmetik, beli krim, serum dan toner di pasar asemka lalu dikemas ulang. *Tempo.Co*. [https://www.tempo.co/hukum/modus-penipuan-kosmetik-beli-krim-serum-dan-toner-di-pasar-asemka-lalu-dikemas-ulang--1211583#goog\\_rewarded](https://www.tempo.co/hukum/modus-penipuan-kosmetik-beli-krim-serum-dan-toner-di-pasar-asemka-lalu-dikemas-ulang--1211583#goog_rewarded)
- Savitri E.I, Wiranto S, dan L. E. (2022). Peran panglima laot dalam meningkatkan ketahanan sosial masyarakat pesisir Aceh. *Jurnal Education and Development Institut Tapanuli Selatan*, 10 (2)(2), 46–53. <http://journal.ipts.ac.id>
- Setiawanty, I. (2025). Polisi tangkap 30 anggota dan pengurus Pemuda Pancasila. *Tempo.Co*.
- Shofa, A. (2022). Praktik kehidupan toleransi di masyarakat desa Pancasila dan implikasinya terhadap ketahanan ideologi. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 28(2), 145–160.
- Shomedran, S., & Karmila Nengsih, Y. (2020). Peran sanggar kegiatan belajar (skb) sebagai satuan pendidikan luar sekolah dalam membangun mutu sumber daya manusia. *Comm-Edu (Community Education Journal)*, 3(3), 271. <https://doi.org/10.22460/comm-edu.v3i3.5214>
- Sudrajat, A., & Samsuri. (2019). Pancasila dalam praksis pendidikan. In *UNY press* (p. viii+424).
- Sugiono, S. (2021). Tantangan dan peluang pemanfaatan augmented reality di perangkat mobile dalam komunikasi pemasaran. *Jurnal Komunika: Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika*, 10(1), 1. <https://doi.org/10.31504/komunika.v10i1.3715>
- Syaadah, R. (2022). Pendidikan formal dan non formal. *PEMA: Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(April), 5–24.
- Taufiq, O. H. (2024). Kebijakan pemerintah dalam menanggulangi ancaman intoleransi beragama terhadap ketahanan ideologi Pancasila di Kabupaten Ciamis , Provinsi Jawa Barat. 30(2), 161–182.
- Utari, E. S., Trilaksono, Ag., Laksono, P. D., Ibrahim, M., Huda, M. M., & Widodo, A. W. (2023). *Implementasi nilai-nilai Pancasila (Penjabaran 45 Butir Pancasila)*. CV Jejak.
- Weda, I. B. K. (2021). Korupsi dalam patologi sosial : sebab, akibat dan penanganannya untuk pembangunan di Indonesia. *Encephale*, 53(1), 59–65. <http://dx.doi.org/10.1016/j.encep.2012.03.001>
- Yona Sidratul Munti, N., & Asril Syaifuddin, D. (2020). Analisa Dampak Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Bidang Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 4(2), 1799–1805.
- Yusuf, R., Hendawati, H., & Wibowo, L. A. (2020). Pengaruh Konten Pemasaran Shoppe Terhadap Pembelian Pelanggan. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(2), 506–515. <https://doi.org/10.38035/JMPIS>

**Biarkan halaman ini tetap ada**

[ halaman ini sengaja dikosongkan ]